

Oleh : Ir. Husain Syam^{*)} dan
Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Ma'arif, M. Eng.^{**)}

KAJIAN PERLUNYA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI SEBAGAI LEADING SECTOR

PENDAHULUAN

Hasil kajian Simatupang dan Purwoto (1990) menyebutkan bahwa agroindustri terbukti telah berhasil memberikan nilai tambah sekitar 20,7 %, penyerapan tenaga kerja 30,8% dan penyerapan bahan baku 89,9% dari total industri yang ada. Hal tersebut mengindikasikan betapa perlunya perhatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan ke arah pengembangan agroindustri menjadi leading sector. Karena sampai saat ini pertanyaan mendasar yang selalu muncul bahwa, adakah regulasi pemerintah yang bias dalam mendukung pengembangan agro-industri, sehingga agroindustri selalu dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting. Pertanyaan selanjutnya adalah industri seperti apa yang dapat menjadi lokomotif yang kuat bagi kemajuan sektor-sektor lainnya dalam menyongsong era liberalisasi perdagangan atau dalam mengantisipasi pasar global. Permasalahan tersebut akan semakin menarik karena pemerintah cukup banyak memberikan



proteksi pada berbagai industri untuk merangsang daya saing di pasaran internasional seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

Profesor Hal-Hill dari Australian National University melihat bahwa konsentrasi industri Indonesia masih tinggi, sehingga dapat dianggap bahwa tingkat proteksi banyak dinikmati oleh industri padat modal. Hal ini diakibatkan karena Indonesia terlalu berambisi membangun industri berat dan padat modal yang kurang mempunyai landasan yang kuat (Basri dan Iksan, 1995). Akibatnya agroindustri dalam pengembangannya menjadi tertinggal.

Selama ini terlihat bahwa pengembangan agroindustri kurang diperhatikan dan tidak jelas siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Oleh karena itu yang menjadi penekanan dalam tulisan ini adalah apakah agroindustri benar-benar perlu mendapat prioritas dalam pengembangannya dan regulasi yang bagaimana yang harus dilakukan seandainya agroindustri menjadi prioritas.

Tabel 1. Tingkat proteksi efektif berbagai Industri di Indonesia (Dalam Presentase)

Jenis Industri	Tahun 1987	Tahun 1990	Tahun 1992
1. Makanan-Minuman	122	126	120
- Tepung Gandum	600	600	600
- Mie Instan	53	115	46
- Gula	600	227	228
- Kedele Olahan	-38	82	82
2. Tekstil dan Pakaian jadi	102	35	34
3. Produk kayu	25	33	33
4. Produk kertas	31	20	20
5. Hasil kimia	14	13	12
6. Pengilangan minyak	-1	-1	-1
7. Produk non-olahan	57	47	44
8. Logam dasar	13	10	10
9. Engineering	152	139	82
10. Lain-lain	124	79	80

Sumber : World Bank, World Development Report, 1993 (dalam Simatupang, 1995) Perekonomian Indonesia Menjelang Abad 21, Jakarta.

^{*)} Program Studi Teknologi Industri Pertanian,
Program Doktor PPs IPB Bogor

^{**)} Guru Besar Jurusan Teknologi Industri Pertanian.

AGROINDUSTRI SEBAGAI LEADING SECTOR

Pola pembangunan ekonomi Indonesia kini dan kedepan harus mengarah kepada era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan adanya perubahan *term of trade* karena rintangan-rintangan perdagangan lambat laun semakin hilang subsidi, tarif, dan arus lalu lintas modal antar negara semakin meningkat yang menimbulkan adanya *Foreign Direct Investment* (FDI) (Devaragan dan Lewis, 1990). Disamping itu arus informasi dalam sector perdagangan makin cepat seiring dengan perubahan selera masyarakat yang mengarah pada selera California (Simatupang, 1995).

Berdasarkan keadaan tersebut, maka kinerja industri di Indonesia akan mengalami hal berikut :

1. Industri yang mendapat perlindungan dari pemerintah melalui subsidi atau tarif akan tertekan pada posisi yang tidak diuntungkan.
2. Industri yang padat modal dan tergolong industri berat yang selama ini memiliki tingkat keunggulan komparatifnya rendah akan dihadapkan pada tantangan produk-produk impor ataupun produk dari investasi asing langsung (FDI)
3. Industri yang monopoli akan dipaksa bersifat kompetitif karena tekanan dari produk impor, FDI ataupun isu HAM
4. Industri yang padat modal dan teknologi dihadapkan pada ketidak patuhan konsumen dalam meng-konsumsi karena cepatnya arus informasi, menyebabkan ketidak efisienan biaya pemasaran seperti melalui promosi berlebihan yang hanya ditujukan untuk kelanggengan produk.
5. Industri yang intensif sumberdaya lokal tampaknya berada dalam posisi yang aman dalam era liberalisasi perdagangan.

Sebagai konsekwensi dari kenyataan tersebut, maka hanya ada dua kebijakan untuk mengatasinya yaitu : (1) efisiensi dalam proses produksi dan (2) memprioritaskan pada pengembangan industri yang berbasis pada sumberdaya lokal. Oleh karena agroindustri berbasis pada sumberdaya lokal, maka tentu saja pada era globalisasi prospeknya sangat cerah, sehingga dimungkinkan akan menjadi *leading sector* dengan beberapa alasan berikut:

1. Kegiatan agroindustri umumnya bersifat *resource based industry*. Kenyataan menunjukkan bahwa di pasar internasional hanya industri yang berbasiskan

sumberdaya lokal yang mempunyai keunggulan komparatif dan mempunyai kontribusi terhadap ekspor terbesar, Dengan demikian pengembangan agroindustri di Indonesia menjamin perdagangan yang lebih kompetitif.

2. Kegiatan agroindustri mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang sangat besar (*Backward dan forward linkages*) yang sangat besar. Secara ekstrim Simatupang (1997) menggambarkan dengan keterkaitan berspektrum luas bahwa keterkaitan agroindustri tidak hanya dengan produk sebagai bahan baku, tapi juga dengan konsumsi, investasi dan fiskal.
3. Besarnya keterkaitan ke depan dan ke belakang bagi kegiatan agroindustri yang apabila dihitung berdasarkan impact multilier secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian diprediksi akan sangat besar. Hal inilah yang menjadi pendekatan dalam menentukan agroindustri *leading sektor* (Hover, 1975 dan Miller, 1988).
4. Bahwa dalam era globalisasi perubahan selera konsumen terhadap barang-barang konsumsi pangan diramalkan akan berubah menjadi cepat saji dan pasar untuk produksi hasil pertanian diprediksikan pula akan terjadi per-geseran dari pasar tradisional menjadi model kentucky. Dengan demikian agroindustri akan menjadi kegiatan bisnis yang paling atraktif.
5. Produk agroindustri umumnya mempunyai elastisitas yang tinggi, sehingga makin tinggi pendapatan seseorang makin terbuka pasar bagi produk agroindustri, karena di negarane-negara berkembang keterkaitan konsumsinya sangat tinggi.
6. Kegiatan agroindustri umumnya menggunakan input yang bersifat *renewable*, sehingga pengembangan agroindustri tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga dapat menghindari pengurangan sumberdaya untuk lebih menjamin *sustainability*.
7. Teknologi agroindustri sangat fleksibel yang dapat dikembangkan dalam padat modal ataupun padat tenaga kerja, dari manajemen sederhana sampai canggih, dari skala kecil sampai besar, sehingga Indonesia yang penduduknya sangat

banyak dan padat, maka dalam pengembangan agroindustri dimungkinkan oleh berbagai segmen usaha.

8. Indonesia mempunyai sumberdaya pertanian yang sangat besar, namun produk pertanian bersifat *perishable*, *bulky* dan musiman, sehingga dalam era globalisasi dimana konsumen umumnya cenderung mengkonsumsi nabati alami setiap saat dengan kualitas tinggi dan tidak busuk, maka dalam kondisi seperti ini peran agroindustri akan semakin dominan.
9. Sesuai dengan amanat pembangunan nasional, bahwa landasan pembangunan Nasional Indonesia adalah Trilogi (pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas) dengan penekanan pada pemerataan. Jika dikaitkan dengan pembangunan sektor industri, maka definisi Trilogi perlu dioperasionalkan. Pertumbuhan dapat dioperasionalkan menjadi pertumbuhan produksi, pendapatan tenaga kerja, jenis industri; Pemerataan dalam kesempatan berusaha, pendapatan, kesempatan kerja, jenis industri; Stabilitas menyangkut produk, pendapatan, kesempatan kerja dan kelestarian usaha.

Berdasarkan alasan tersebut, maka strategi pembangunan agroindustri nasional harus menjadi pilihan utama dan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini dikarenakan oleh usaha peningkatan kesempatan kerja, peningkatan ekspor, pertumbuhan, pemerataan, pengentasan kemiskinan dan ketahanan nasional dapat terjamin. Jadi agroindustri harus dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia.

ARAH STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI MENGHADAPI PASAR GLOBAL

Sesuai dengan karakteristiknya bahwa agroindustri bersifat *resources based industry*, maka arah strategi pengembangannya harus didasarkan pada pendekatan wilayah potensi sumberdaya dengan tetap berpijak pada konsep keunggulan komparatif dinamis, dimana diperlukan peran pemerintah untuk dapat mengarahkan keunggulan komparatif dalam jangka panjang. Oleh karena itu model yang tepat untuk itu adalah "*Role of Government - Directed Compoerative Advantage*" (Aggarwal R dan Agmon T, 1990)

untuk dijadikan sebagai strategi kebijakan dalam pengembangan industri dalam era perdagangan bebas.

Model yang dimaksud di atas menunjukkan bahwa agroindustri di Indonesia masih pada tahap konsolidasi. Dengan demikian apabila kita ataupun pemerintah berkehendak untuk menjadikan negara Indonesia menjadi "*Newly Agro-Industrializing Country*" (NAIC), maka kebijakan-kebijakan dalam rangka pengembangan agroindustri dirasakan sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Sementara di sektor industri, karakteristik utamanya adalah fleksibilitas yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Kelenturan dalam mengembangkan diversifikasi baik jenis maupun kualitas produk akan membuat sektor ini lebih mudah berakses terhadap pasar maupun dalam menyesuaikan dengan lokasi. Kelebihan ini merupakan peluang bagi sektor industri untuk dapat lebih menyesuaikan diri dengan sektor pertanian khususnya di dalam pengembangan pada kawasan-kawasan sentra pengembangan agroindustri komoditi unggulan.

Proses transformasi menuju pertanian yang berbudaya enterpreneur diharapkan dapat menjadi pemicu bagi percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Proses transformasi tersebut dihantarkan melalui pendekatan pembangunan pertanian berorientasi agribisnis dan agroindustri. Pendekatan agribisnis dan agroindustri merupakan suatu pendekatan sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu : (1) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia, (2) sub-sistem budidaya atau usaha tani, (3) sub-sistem pengolahan hasil pertanian atau agroindustri, (4) subsistem pemasaran hasil pertanian dan (5) subsistem sarana dan prasarana penunjang.

Melalui pendekatan sistem tersebut, keterkaitan dengan agroindustri dalam pengembangan dan penyaluran sarana produksi, penyediaan dana dan investasi, serta teknologi dengan dukungan sistem tata niaga dan perdagangan yang efektif. Sebagai sektor yang diharapkan mampu menghela per-ekonomian pedesaan, maka penumbuhan agroindustri pedesaan perlu direkayasa dengan prinsip dasar (1) memacu keunggulan kompetitif produk serta komparatif wilayah, (2) memacu peningkatan sumber daya manusia dan penumbuhan agroindustri yang sesuai dengan kondisi setempat, (3) memperluas kawasan sentra-sentra komoditas unggulan yang nantinya

akan berfungsi sebagai pemasok bahan baku yang berkelanjutan, dan (4) memacu pertumbuhan subsistem lainnya serta menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri perdesaan.

Pemerintah daerah akan lebih berperan dalam pengelolaan investasi, perijinan, pembinaan usaha agribisnis, pertanahan dan lain-lain sesuai dengan kebijaksanaan otonomi daerah. Dampak paling positif adalah komponen impor akan berkurang, migrasi tenaga kerja dari desa ke kota akan ditekan dan dalam jangka panjang akan tumbuh mikropolitan-mikropolitan berbasis agro-industri pedesaan. Jika ini terjadi, maka keseimbangan (equilibrium) akan terjadi dan generasi mendatang akan menikmati modernisasi pedesaan.

Untuk menuju ke arah tersebut yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumberdaya manusia yang handal dalam membangun modernisasi pedesaan yang dimotori agroindustri pedesaan. Dengan demikian aspek yang lebih fundamental adalah membangun sikap mental dan budaya sebagaimana layaknya yang hidup di masyarakat industri. Budaya enterpreneur ini mempunyai ciri sebagai berikut : (1) pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan (bukan intuisi atau kebiasaan saja); (2) kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan sumberdaya; (3) mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa; (4) efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumberdaya dan karenanya membuat hemat dalam penggunaan sumberdaya; (5) mutu keunggulan merupakan orientasi, wacana sekaligus tujuan; (6) profesionalisme merupakan karakter yang menonjol dan pada akhirnya (7) perekayasaan harus menggantikan ketergantungan pada alam sehingga setiap produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan lebih dahulu dalam mutu, jumlah, berat, volume, bentuk, ukuran, rasa dan sifat-sifat lainnya dengan ketepatan waktu.

Paradigma dalam membangun modernisasi pertanian dan pedesaan ber-budaya enterpreneur sedikitnya mempunyai tiga aspek yaitu : Pertama, dapat dimulai dengan mengutamakan manusia dan kelembagaan pedesaan tempat pertanian itu berada. Artinya dimulai dari akar permasalahannya, yaitu : manusia sebagai pelaku sekaligus sebagai tujuan pembangunan, dan kelembagaan sebagai motor yang menggerakkan perilaku berbagai wujud (entities) sosial ekonomi. Kedua, dengan

menggunakan desa sebagai wadah kegiatan, akan memperluas wawasan dari sektor ke wilayah. Jadi dengan menggunakan desa sebagai basis investasi prasarana dan sarana yang menunjang keperluan pertanian dapat diarahkan secara terpadu. Ketiga, dengan pendekatan kewilayahan tersebut akan diperoleh hubungan kota-desa. Sudah saatnya kini diubah persepsi kedudukan kota dan desa. Desa sudah tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan, tetapi sebaliknya, perkembangan suatu kota harus berkait dengan perkembangan daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan kota harus turut meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi di daerah pedesaan. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi dan harmonis antara desa dan kota.

Berdasarkan bahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanian ber-wawasan industri akhirnya sejalan dengan industrialisasi pedesaan dan keterkaitan sinergis antara desa dengan kota.

INSTRUMEN REGULASI UNTUK PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI UNGGULAN YANG TERINTEGRASI

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa telah banyak jenis agroindustri yang telah diusahakan oleh masyarakat, namun sebagian besar dicirikan oleh karakteristik yang kurang menguntungkan. Karakteristik agroindustri yang dimaksud berupa : tidak kontinyu, skala usahanya kecil, kualitas rendah, kemasannya sederhana, pasarnya lokal dan terbatas, teknologinya sederhana, manajemennya terkait dengan kepentingan rumah tangga. Akan tetapi di sisi lain, terdapat agroindustri dalam jumlah dan jenisnya terbatas dengan teknologi maju dan padat modal yang berlokasi di kota-kota besar, sehingga kurang berdampak pada perekonomian desa. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sangat respons untuk mengembangkan agroindustri, namun tetap saja belum berkembang karena tidak ada keterkaitan antar sektor hulu dan hilir.

Dalam era liberalisasi perdagangan, produk agroindustri di pasar akan dipengaruhi oleh perubahan eksternal. Perubahan tersebut menyangkut "Term of trade" sekaligus menyangkut teknologi regulasi perdagangan bebas seperti adanya Foreign Direct Investment (FDI), perubahan

gaya hidup (*life style*) dan perubahan karena unsur demografi seperti daya beli, migrasi penduduk dan sebagainya. Oleh karena itu upaya pengadaan produk-produk agroindustri agar mempunyai keunggulan komparatif harus memenuhi persyaratan wajib (*necessary condition*) yaitu : produk yang dihasilkan dengan biaya rendah, memberikan nilai tambah tinggi, mempunyai kualitas tinggi, mempunyai keragaman untuk berbagai segmen pasar, mampu mensubstitusi produk impor sejenis.

Agroindustri yang mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) telah dikembangkan oleh pemerintah melalui model integrasi hulu-hilir dalam berbagai bentuk, seperti : Perusahaan Inti rakyat, Kontrak Usaha, Perusahaan penghela dan Bapak Angkat. Konsep ini berkeinginan untuk mengangkat golongan industri kecil menjadi industri menengah atau besar, namun yang terjadi adalah orang kecil berbaju besar. Akibatnya beberapa kalangan mengusulkan bukan lagi integrasi vertikal, akan tetapi koordinasi vertikal (Simatupang, 1995) sehingga kemudian dianjurkan konsep kemitraan. Terlepas dari berbagai istilah tersebut, sebenarnya yang terpenting adalah integrasi bukan pengertiannya mengenai pola usaha kegiatan agroindustri. Akan tetapi instrumen kebijakan apa yang mampu dipadukan untuk pengembangan agroindustri, sehingga konsep integrasi harus didefinisikan dalam arti luas dari seluruh perangkat atau instrumen kebijakan.

Berdasarkan kenyataan bahwa dalam era liberalisasi perdagangan, peranan perlindungan pemerintah akan semakin berkurang. Oleh karena itu, untuk menumbuhkembangkan agroindustri yang berorientasi pasar global tidak ada pilihan lain kecuali membuat suatu kerangka yang saling

menumbuhkembangkan antara industri hulu dan hilir secara *endogenous* sedangkan pemerintah hanya sebagai katalisator.

Beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dan sekaligus acuan dalam merumuskan instrumen untuk regulasi pengembangan agroindustri ke depan adalah :

1. Penentuan Lokasi

Dalam upaya mengembangkan agroindustri yang mempunyai daya saing tinggi yang didasari oleh kenyataan bahwa agroindustri itu bersifat "*resource based industry*", sehingga pengembangannya harus didasarkan pada wilayah potensi sumberdaya. Untuk itu pemerintah diharapkan membuat peta pengembangan agroindustri. Jika hal ini dilaksanakan, maka pengembangan agroindustri tidak hanya sekedar berkembang, tetapi lebih dari itu mampu meningkatkan perkonomian di daerah sekitarnya. Oleh karenanya pendirian agroindustri dalam skala besar yang tidak didasarkan pada potensi sumberdaya wilayah sepatutnya dilarang, karena nantinya akan menimbulkan "*foot loss industry*". (Simatupang, 1990).

2. Pola Usaha

Pola usaha yang tepat dalam pengembangan agroindustri adalah pola kemitraan. Namun sering kali pola kemitraan dilakukan karena : keterpaksaan oleh himbuan pemerintah, bantuan sosial pengusaha besar, perolehan insentif, ataupun karena hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Padahal secara teoritis pola usaha agroindustri dapat dikembangkan melalui Pola Mandiri, Mitra usaha, dan Koperasi. Strategi pemilihan pola usaha agroindustri dapat dilakukan berdasarkan Tabel berikut.

**BERDASARKAN KENYATAAN BAHWA
DALAM ERA LIBERALISASI
PERDAGANGAN, PERANAN
PERLINDUNGAN PEMERINTAH AKAN
SEMAKIN BERKURANG. OLEH
KARENA ITU, UNTUK
MENUMBUHKEMBANGKAN
AGROINDUSTRI YANG
BERORIENTASI PASAR GLOBAL
TIDAK ADA PILIHAN LAIN KECUALI
MEMBUAT SUATU KERANGKA YANG
SALING MENUMBUHKEMBANGKAN
ANTARA INDUSTRI HULU DAN HILIR
SECARA *ENDOGENUS* SEDANGKAN
PEMERINTAH HANYA SEBAGAI
KATALISATOR.**

Tabel 2. Alternatif Bentuk Usaha Agroindustri

Sifat Agroindustri	Pola		
	Mandiri	UsahaKemitraan	Koperasi
1. Economic of scale	DRS & CRS	IRS	IRS
2. Economic of scope	DRS & CRS	IES	IES
3. Kebutuhan modal	Rendah	Tinggi	Tinggi
4. Kemitraan Teknologi	Rendah	Tinggi	Rendah
5. Kerumitan	Rendah	Tinggi	Rendah
6. Manajemen	Rendah	Tinggi	Rendah
7. Gestation peiodologi	Kontinyu	Deskrit	Kontinyu
8. Kontinuitas produksi			

Sumber : Simatupang, 1997

Tabel 2 menunjukkan bahwa, pola kemitraan hanya dapat diwujudkan apabila biaya pokok semakin meningkat dan volume produksi semakin besar (IRS = *increasing return to scale*) dan bukan pada kondisi yang (DRS = *decreasing*) ataupun yang konstan (CRS). Apabila biaya pokok semakin menurun dan jumlah cakupan usahanya semakin banyak (IES = *increasing economic of scope*), bukan semakin naik (DES) dan konstan (CES). Oleh karena itu, jika pola usah agroindustri tersebut diarahkan pada segi efisiensi, maka tentu saja harus memenuhi kriteria tersebut. Kalau tidak, pola kemitraan malah akan menghambat pertumbuhan.

Kenyataan memberikan implikasi bahwa dalam mengembangkan pola usaha agroindustri haruslah dilakukan pengkajian secara cermat, bahkan kalau mungkin saat ini lebih banyak ditentukan oleh jenis agroindustri yang sesuai melalui Koperasi non-KUD.

3. Teknologi

Teknologi untuk agroindustri hingga saat ini boleh dikatakan cukup banyak, namun sifatnya tercecer dalam berbagai Lembaga Penelitian ataupun Perguruan Tinggi, dimana satu skala dengan skala yang lainnya tidak terkait. Selain itu, teknologi yang dihasilkan umumnya masih belum siap jual karena pendekatannya masih parsial dan bahkan jarang yang terkait dengan teknologi pengemasan. Seperti diketahui bahwa dalam bisnis agroindustri justru kemasan sering lebih dipentingkan. Oleh karenanya pengembangan teknologi agroindustri kini dan dimasa datang perlu di arahkan pada satu paket lengkap dengan teknologi kemasannya. Permasalahan lain yang tengah dihadapi adalah segi transfer teknologi. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa

sampai saat ini masyarakat boleh dikatakan jarang atau bahkan tidak pernah mendapat penyuluhan teknologi agroindustri. Dengan demikian perlu dirancang suatu lembaga yang terintegrasi dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai pada level operasional di industri kecil menengah yang ada di pelosok perdesaan.

4. Pemasaran

Dalam segi bisnis, manajemen pemasaran adalah aspek yang sangat penting, bahkan oleh UKM memandang bahwa permasalahan yang paling dominan yang tengah dihadapi selain faktor modal adalah kesulitan dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu upaya pengembangan agroindustri seyogyanya memperhatikan *product life cycle*, segmentasi pasar, *positioning*, market respon dan pola persaingan. Dengan demikian kegiatan manajemen pemasaran harus dilakukan secara tepat, hal demikian sulit dilakukan agroindustri skala kecil.

Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah, tetapi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar. Oleh karena itu pemerintah hanya dapat menganjurkan agar dilakukan pola kemitraan dalam segi pemasaran antar agroindustri skala kecil dengan agroindustri menengah atau besar.

Suatu pemikiran yang menarik bahwa untuk mengantisipasi persoalan pemasaran bagi UKMK, maka solusinya adalah mengembangkan industri skala kecil atau UKMK yang berorientasi pada sentra produksi atau pedesaan, padat karya dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya membentuk jejaring usaha (*Business Network*) dengan prinsip kesetaraan, sehingga memiliki kekuatan untuk dapat menembus pasar global seperti halnya industri besar.

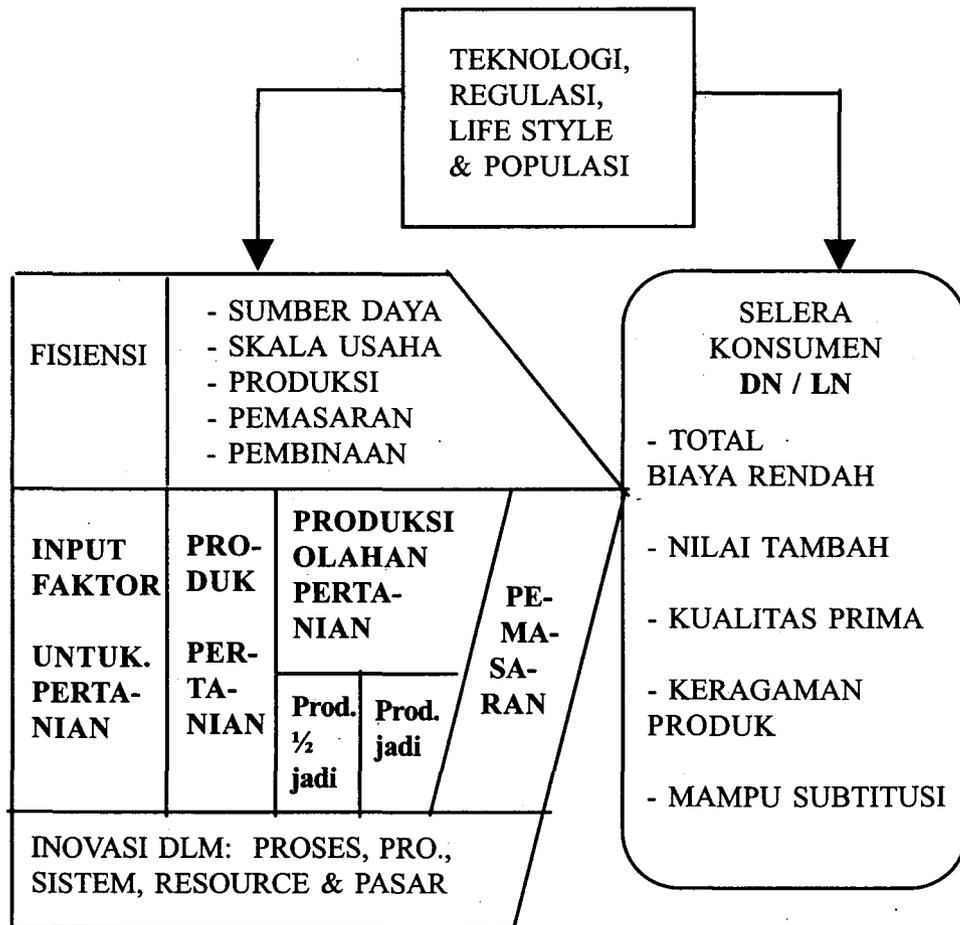
5. Keterkaitan Sektor Penunjang Agroindustri

Agroindustri yang menggunakan bahan baku hasil pertanian tentu saja sangat terkait dengan efisiensi pada sektor pertanian. Jika pada sektor pertanian berjalan tidak efisien, maka tentu saja agroindustri juga tidak efisien. Faktor penting lainnya adalah pengembangan infrastruktur dan industri penunjangnya. Mustahil dapat mengembangkan agroindustri jika tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai serta industri penunjang lainnya. Kenyataan menunjukkan, bahwa dalam era pasar bebas yang ditandai dengan era efisiensi, maka otomatis peranan perlindungan pemerintah akan semakin berkurang (subsidi, tarif, hak monopoli dan sebagainya) akan hilang, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali membuat model

Model kebijakan endogenus di atas menunjukkan bahwa, apabila agroindustri tidak berkembang akibatnya sektor pertanian juga tidak berkembang. Sebaliknya apabila sektor pertanian tidak efisien, maka agroindustri juga tidak efisien, sehingga tidak akan berkembang.

Oleh karenanya perusahaan agroindustri di hilir berkewajiban mengefisienkan industri disektor hulu melalui transfer modal, teknologi, informasi pasar, dan kualitas produk. Sebaliknya industri hulu berkewajiban menjual hasilnya pada industri hilir.

Permasalahan yang sering muncul adalah apa "opportunity cost" atau balas jasa industri hilir dari peranannya untuk mengembangkan sektor hulu. Banyak kasus sering dilakukan melalui "proce exploitation" dalam pembelian inputnya, namun jika organisasi produsen sangat kuat, akan



Gambar 1. Model Endogenus Pengembangan Agroindustri yang Terintegrasi (Soepanto, 1997)

kebijakan *endogenous* yang saling menumbuhkembangkan antara industri hulu dan hilir serta komponen yang terkait dalam agroindustri. Regulasi dengan model kebijakan endogenus pengembangan agroindustri diperlihatkan dalam Gambar 1.

menimbulkan masalah sosial yang justru merugikan usahanya. Oleh karenanya yang paling tepat adalah balas jasa dari pemerintah melalui keringanan pajak, infrastruktur, perijinan, bantuan R&D, kemudahan kredit dan lain-lain bagi agroindustri hulu yang melakukan integrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan agroindustri di Indonesia dapat dijadikan "leading sector" karena agroindustri bersifat "resource based industry", dimana Indonesia didukung oleh sumberdaya pertanian.

Upaya yang paling tepat untuk mendorong perkembangan agroindustri pedesaan ialah dengan memacu pertumbuhan produktivitas, penyerapan tenaga kerja dan produksi usaha pertanian dan bukan dengan memacu pertumbuhan perusahaan, produktivitas dan efisiensi agroindustri secara langsung.

Komponen penting sebagai acuan dalam merumuskan instrumen untuk regulasi pengembangan agroindustri ke depan adalah : (1) Penentuan lokasi, (2) Pola usaha, (3) Teknologi, (4) Pemasaran dan (5) Keterkaitan sektor penunjang agroindustri.

Dalam mengembangkan agroindustri seharusnya berorientasi pada pembangunan industri di sentra produksi atau pedesaan, padat karya dan berkelanjutan dengan bangun perusahaan sesuai adalah UKMK. Kemudian disinergikan melalui pola jejaring usaha (*Business Network*) dengan prinsip kesetaraan, sehingga memiliki kekuatan untuk dapat menembus pasar global seperti halnya industri besar. Untuk menjadikan Indonesia sebagai "Newly Agroindustrializing Country (NAIC)", maka disarankan agar kebijakan mengenai pengembangan agroindustri segera dirancang karena sangat mendesak untuk dilakukan.

REFERENSI

- Aggarwal R dan Agmon T., 1990. *The International Success of Developing Country Firms : Role of Government-Directed Comparative Advantage*, *Management International Review*, Volume 30/2:pp.163-180.
- Basri dan Iksan., 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang abad XXI*, Erlangga.
- Devaragan S., Lewis, J.D., and Robinson, S., 1990, *Policy Lessons from Trade-Focussed*, *Two sektor models*, *Jurnal of Policy Modeling*, 12(4) : pp.625-657.
- Djojodiharjo H., 1997. *Peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penelitian dan Pengembangan dalam Meningkatkan Peran Agroindustri di Indonesia* : Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Agroindustri III, IPB, Bogor 4-5 September 1997.
- Kahar, A., 1997. *Kebijaksanaan Teknis dan Program Pengembangan Agribisnis*. Makalah disampaikan pada Pekan Orientasi Wartawan, Jakarta.
- Kartasasmita, G., 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Per-tumbuhan dan Pemerataan*. CIDES, Jakarta.
- Miller, T.C., 1990, *Agricultural price policies and political interest group competition*, *Jurnal of policy modeling*, 13(4):pp.489-513.
- Haeruman H., 1997. *Pembangunan Pertanian Yang Maju : Integrasi Agoindustri Hulu-Hilir dan Penunjang*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Agro-industri III, IPB, Bogor 4-5 September 1997.
- Simatupang, P., 1995. *Industrialisasi Pertanian Sebagai Strategi Agri-bisnis dan Pembangunan Pertanian Dalam Era Globalisasi* : Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama, PSE. Bogor.
- Simatupang, P., 1997. *Akselerasi Pem-bangunan Pertanian dan Pedesaan Melalui Strategi Keterkaitan Berspektrum Luas*. PSE. Bogor.
- Soepanto, 1997, *Tinjauan terhadap kebijakan dan regulasi pemerintah yang menunjang dan menghambat proses integrasi agroindustri sertaantisipasi menghadapi pasar bebas dunia*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Agroindustri III, 4-5 September 1997, Bogor.
- Suprpto A., 1997. *Agroindustri Masa depan* : Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Agroindustri III, 4-5 September 1997.